

ABSTRAK

Penangkapan dan penahanan merupakan wewenang yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang. Ketidakcermatan Penyidik dalam menjalankan wewenang tersebut seringkali menimbulkan Permasalahan baru yaitu kesalahan penangkapan atau dalam hukum pidana sering dikenal dengan *Error in Persona*. Ganti kerugian dan Rehabilitasi adalah upaya hukum yang dijamin oleh undang undang saat seseorang menjadi korban dalam kasus *Error in Persona*. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah tanggung jawab dan hambatan yang dihadapi Korban salah tangkap dalam mengajukan haknya untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi.

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian pustaka dan studi terhadap putusan hakim yang terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap dalam sistem peradiolan pidana di Indonesia kurang maksimal. Hambatan internal yang timbul dalam pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi berkaitan erat dengan peraturan mengenai ganti kerugian yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, dan Pola pikir masyarakat yang mengedepankan kekeluargaan. Sedangkan hambatan eksternal yaituketidaktahuan masyarakat tentang hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi yang di berikan oleh undang-undang dan Prosedur serta pemberian hak ganti kerugian yang sangat lama.

Kata kunci : Prosedur pemberian, Ganti kerugian dan Rehabilitasi, Error in Persona.

ABSTRACT

Arrest and detention is the authority granted by the Indonesian National Police Investigators according to the Law. Investigators' inaccuracies in carrying out these authorities often lead to new problems, namely arrest errors or in criminal law often known as Error in Persona. Compensation and Rehabilitation is a legal effort guaranteed by law when a person becomes a victim in the case of Error in Persona. As for the problems in writing this law, it is the responsibility and obstacles faced by the Victims who are wrongly caught in submitting their rights to request compensation and rehabilitation.

The method of writing this law uses a normative juridical approach. Data sources used in this study are secondary data obtained from literature. The research was carried out through library research and studies of related judge decisions.

The results of the study indicate that in practice the provision of compensation and rehabilitation of victims of wrongful arrests in the criminal peradiolan system in Indonesia is not optimal. Internal barriers that arise in the implementation of compensation and rehabilitation are closely related to regulations regarding compensation that are not relevant to the development of the times, and patterns of thinking of people who prioritize family. While the external obstacles are the ignorance of the community about the right to claim compensation and rehabilitation provided by the law and procedures and the provision of very long compensation rights.

Keywords: Procedure for giving, Compensation and Rehabilitation, Error in Persona